ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) TERHADAP ANGKUTAN BARANG DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

VIRA FIRYAAL
A1011211004

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) TERHADAP ANGKUTAN BARANG DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

SKRIPSI

O l e h :

VIRA FIRYAAL
A1011211004
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) TERHADAP ANGKUTAN BARANG DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA

Tanggung-Jawab Yuridis Pada:

VIRA FIRYAAL
A1011211004

Disetujui oleh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Sri Widyastuti, S.H., LL.M.,M.Si.	**Devina Puspita Sari,S.H.,M.H**
NIP. 197601282005012002	**NIP. 198912152022032008**

Disahkan Oleh:
Dekan

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal lulus: 31 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji / Pembimbing I	Sri Widyastuti, S.H., L.L.M., M.Si NIP. 197601282005012002	Penata Tingkat I / III d	
Sekretaris Penguji / Pembimbing II	Devina Puspita Sari, SH.M.H. NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I / III b	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., M.H NIP. 196107251990022000	Pembina / IV b	
Penguji II	Dina Karlina, S.H., M.Hum. NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I / III d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2948/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 29 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 22 Juli 2025

Yang Membuat Pernyataan,



VIRA FIRYAAL

A1011211004

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) TERHADAP ANGKUTAN BARANG DI KECAMATAN PONTIANAK UTARA**" ini dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LLM. selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

5. Bapak Prof. Dr. H. Kamarullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan masa perkuliahan dengan baik.
6. Ibu Sri Widyastuti, S.H., L.L.M., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Devina Puspita Sari, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
9. Ibu Dina Karlina, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis selama penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan.
11. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Tanjugpura Pontianak yang telah membantu penulis dalam sistem administrasi selama menjalani perkuliahan.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Pontianak, 22 Juli 2025
Penulis

VIRA FIRYAAL
NIM. A1011211004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Ketika Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba, Dia akan mengujinya. Jika ia sabar, maka ia naik derajat."
(Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)

"Kalau jalanmu terasa sulit itu berarti kau sedang menuju sesuatu yang besar."
(Monkey D Luffy)

"Seekor burung yang duduk di atas pohon tidak pernah takut rantingnya patah, karena kepercayaannya bukan pada cabang dahannya, tetapi kepada kemampuannya untuk terbang."
(Jalaluddin Rumi)

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam laporan skripsi ini kecuali lembar motto dan persembahan, skripsi ini penulis persembahkan kepada yang Teristimewa untuk kedua malaikat tanpa sayap dalam hidup penulis, Bapak Adi Jamhari, S.H tercinta dan Mama Zuliyanti Husaini tersayang. Tidak ada kata yang mampu mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala pengorbanan, do'a yang tak pernah putus, air mata kebahagiaan dan kekhawatiran, serta kasih sayang yang mengalir tanpa batas. Tangan-tangan kalian yang bekerja keras demi masa depanku, senyuman tulus di balik kelelahan, dan kepercayaan yang tak pernah surut menjadi kekuatan terbesar dalam perjalanan ini. Setiap langkah yang penulis tempuh adalah buah dari keringat dan doa kalian. Gelar yang penulis raih ini bukanlah milik penulis semata, tetapi milik kalian yang telah

menjadi guru kehidupan terbaik. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan surga-Nya yang terindah, dan semoga penulis dapat membanggakan serta membahagiakan kalian hingga akhir hayat. Terima kasih telah menjadi orang tua yang luar biasa, yang tak pernah lelah mencintai dan mendoakan penulis.

Untuk sahabatku, Ahin. Terima kasih telah menjadi pendengar setia di setiap keluh kesah, pemberi semangat ketika motivasi mulai memudar, dan teman diskusi yang tak pernah bosan membantu mencari solusi atas setiap kebuntuan dalam penulisan. Setiap saran yang membangun, bantuan mencari referensi, dan waktu yang telah luangkan untuk membaca draft demi draft tulisan ini adalah kontribusi yang sangat berharga. Semoga persahabatan yang telah terjalin ini akan terus abadi, dan semoga kita dapat meraih kesuksesan bersama.

Untuk Vira Firyaal, penulis juga ingin mengapresiasi diri sendiri atas perjuangan yang telah dilalui. Setiap tantangan yang menghadang, dan setiap kali bangkit dari keterpurukan adalah bukti kekuatan dan ketabahan yang penulis miliki. Penulis bangga telah mampu bertahan dalam tekanan, konsisten dalam usaha, dan tidak pernah menyerah meskipun berkali-kali merasa ingin berhenti. Kemampuan untuk terus belajar, beradaptasi dengan kritik, dan tumbuh dari setiap kesalahan adalah pencapaian yang patut dihargai. Skripsi ini bukan hanya sebuah karya akademis, tetapi juga cerminan dari perjalanan transformasi diri yang luar biasa. Penulis telah membuktikan bahwa dengan tekad yang kuat, disiplin yang konsisten, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman, tidak ada yang tidak mungkin untuk dicapai.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN v
KATA PENGANTAR vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ix
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
ABSTRAK xvi
BAB 1 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Keaslian Penelitian 8
BAB II 12
TINJAUAN PUSTAKA DAN TINJAUAN TEORI 12
A. Tinjauan Pustaka 12
1. Hukum Transportasi 12
2. Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) 18
B. Tinjauan Teori 21
1. Teori kesadaran hukum 21
2. Teori Pembinaan dan Pengawasan 24
BAB III 31
METODE PENELITIAN 31
A. Jenis dan Sifat Penelitian 31
B. Jenis Data 32
C. Teknik Pengumpulan Data 34
D. Teknik Penentuan Populasi dan Sampel Penelitian 36
E. Analisis Data 38

BAB IV 39
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penimbangan Angkutan Barang Melalui UPPKB di Kecamatan Pontianak Utara 39
B. Upaya Untuk Meningkatkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penimbangan Angkutan Barang Melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kecamatan Pontianak Utara 68
BAB V 75
KESIMPULAN DAN SARAN 75
A. Kesimpulan 75
B. Saran 78
DAFTAR PUSTAKA 81

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 : Persentase Kelebihan Muatan Januari-Juni 61

Tabel 4.2 : Penindakan Terhadap Pelanggaran Kendaraan Muatan 63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Bagan Alur Pelaksanaan Kegiatan Penimbangan di UPPKB Siantan 54

Gambar 4.2 : Bagan Alur Prosedur Penimbangan Kendaraan Bermotor 57

Gambar 4.3 : Bagan Alur Prosedur Pemeriksaan Tata Cara Pemuatan Barang 59

Gambar 4.4 : Bagan Alur Prosedur Pemeriksaan Dimensi Kendaraan Angkutan Barang 60

Gambar 4.5 : Grafik Pelanggaran Per Januari - Juni 2025 62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	:	Dokumentasi pelaksanaan tugas UPPKB Kelas I Siantan Kecamatan Pontianak Utara
Lampiran II	:	Dokumentasi hasil wawancara Kepala Pengawas UPPKB kelas I Siantan Kecamatan Pontianak Utara
Lampiran III	:	Dokumentasi hasil pembagian kuesioner Pengemudi/supir
Lampiran IV	:	Dokumentasi hasil pembagian kuesioner masyarakat yang tinggal disekitar UPPKB kelas I Siantan Kecamatan Pontianak Utara
Lampiran V	:	Dokumentasi rambu peringatan UPPKB kelas I Siantan Kecamatan Pontianak Utara
Lampiran VI	:	Dokumentasi kendaraan angkutan barang yang berhenti di bahu jalan untuk menghindari pemeriksaan UPPKB kelas I Siantan Kecamatan Pontianak Utara
Lampiran VII	:	Surat pengantar penelitian UPPKB kelas I Siantan Kecamatan Pontianak Utara

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) terhadap angkutan barang di Kecamatan Pontianak Utara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa pelaksanaan tugas dan fungsi penimbangan angkutan barang melalui UPPKB di Kecamatan Pontianak Utara belum berjalan sesuai mandat undang-undang dan bagaimana upaya untuk meningkatkan pelaksanaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan merumuskan strategi peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi UPPKB.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif preskriptif. dalam penulisan ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi ke lapangan, wawancara dengan kepala pengawas UPPKB, dan penyebaran kuesioner kepada 20 supir angkutan barang serta 10 masyarakat sekitar. Data dianalisis secara kualitatif untuk membandingkan antara *das sollen* dan *das sein* dalam implementasi peraturan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi UPPKB Kelas I Siantan terbagi dalam 5 (lima) kegiatan: (1) pemeriksaan dokumen kendaraan dan dokumen perjalanan, (2) penimbangan kendaraan bermotor pada *platform*, (3) pemeriksaan dan tata cara pemuatan angkutan barang, (4) pemeriksaan dimensi kendaraan, (5) pemeriksaan persyaratan teknis laik jalan. Penulis menemukan beberapa fakta bahwa pelaksanaan tersebut belum optimal karena tiga faktor utama: (1) penerapan sanksi yang belum sesuai peraturan dan Standar Operasional Prosedur, yang mengakibatkan lemahnya efek jera, (2) kekurangan fasilitas penunjang seperti penerangan jalan yang menghambat operasional malam hari, dan (3) rendahnya kesadaran hukum supir, dimana 50% responden tidak pernah melakukan penimbangan dan 60% tidak mematuhi batas muatan. Upaya peningkatan yang direkomendasikan meliputi penguatan penegakan hukum sesuai Standar Operasional Prosedur, pengembangan fasilitas pendukung, peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi, pelatihan berkelanjutan petugas, dan penguatan kerjasama antar lembaga terkait.

Kata kunci: Angkutan Barang, Penegakan Hukum, Penimbangan Kendaraan, Pontianak Utara, UPPKB

ABSTRACT

This research analyzes the implementation of duties and functions of the Motor Vehicle Weighing Implementation Unit (UPPKB) for freight transport in North Pontianak District. The research problems addressed are: why the implementation of freight transport weighing duties and functions through UPPKB in North Pontianak District has not been carried out in accordance with the legal mandate, and what efforts can be made to improve its implementation. The objectives of this research are to analyze the inhibiting factors and formulate strategies to enhance the effectiveness of UPPKB's duties and functions implementation.

The research method employed is juridical-empirical with a qualitative prescriptive approach. This study utilizes both primary and secondary data. Data collection techniques were conducted through field observations, interviews with the UPPKB supervisory head, and questionnaire distribution to 20 freight transport drivers and 10 local community members. Data were analyzed qualitatively to compare between das sollen and das sein in regulation implementation.

The research findings indicate that the implementation of duties and functions of UPPKB Class I Siantan is divided into five (5) activities: (1) examination of vehicle documents and travel documents, (2) motor vehicle weighing on the platform, (3) inspection and freight loading procedures, (4) vehicle dimension inspection, and (5) examination of roadworthy technical requirements. The author identified several facts indicating that the implementation has not been optimal due to three main factors: (1) sanction application that does not comply with regulations and Standard Operating Procedures, resulting in weak deterrent effects, (2) insufficient supporting facilities such as road lighting that hinders nighttime operations, and (3) low legal awareness among drivers, where 50% of respondents never conduct weighing and 60% do not comply with load limits. Recommended improvement efforts include strengthening law enforcement in accordance with Standard Operating Procedures, developing supporting facilities, enhancing legal awareness through socialization, continuous officer training, and strengthening inter-agency cooperation.

Keywords: Freight Transport, Law Enforcement, North Pontianak, UPPKB, Vehicle Weighing,

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian transportasi secara umum adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.[1] Transportasi berperan penting dalam perkembangan suatu daerah yang menghubungkan pusat produksi dan pusat distribusi di sektor perekonomian. Pergerakan di bidang ekonomi ini membutuhkan adanya sarana dan prasarana yang baik untuk menunjang perkembangannya, khususnya sarana dan prasarana transportasi.

Salah satu moda transportasi yang banyak digunakan untuk mengangkut barang adalah transportasi darat. Angkutan barang menggunakan transportasi darat memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

1. Pengiriman barang melalui jalan raya dapat disesuaikan selama perjalanan, tergantung pada kebutuhan pengirim dan kargo.
2. Transportasi darat dapat menjangkau daerah-daerah yang tidak dapat dijangkau oleh moda transportasi lain.
3. Transportasi darat dapat menjadi salah satu moda transportasi logistik yang paling hemat biaya, terutama untuk pengiriman jarak pendek dan volume besar.

[1] Dinas perhubungan kabupaten buleleng. 2014 *"Transportasi dan Bagian-Bagiannya",* Available from: https://dishub.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/transportasi-dan-bagian-bagiannya-77# (Diakses 15 November, 2024).

4. Pengangkutan melalui jalan darat tersedia dan mudah diakses.
5. Transportasi jalan raya sering kali melibatkan lebih sedikit penanganan fisik terhadap suatu barang.[2]

Faktor-faktor tersebut memungkinkan adanya angkutan barang yang membawa muatan berlebih melalui jalan raya dan beresiko terhadap infrastruktur jalan. Kegitan transportasi angkutan barang memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah khususnya untuk melakukan pengawasan dan penindakan dalam rangka penegakkan hukum terhadap kendaraan angkutan barang bermuatan lebih yang melintas. Perlunya penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan sosial sehingga perlindungan terhadap sarana kepentingan umum menjadi nyata.

Sejalan perkembangan dinamika sektor transportasi darat, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari Undang- Undang Nomor 14 tahun 1992, khususnya dalam pasal 169 pengaturan pengawasan angkutan barang, diberlakukan ketentuan muatan angkutan barang yang sesuai berat barang berdasarkan berat muatan yang diizinkan.

---

[2] corlettexpress-com. 2019. *"What Are The Advantages Of Road Transport?"* Available from: https://corlettexpress-com.translate.goog/what-are-the-advantages-of-road-transport/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge# (Diakses November 15, 2024)

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 169 ayat (1): Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenal tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.[3]

Maka sudah saatnya Pemerintah khususnya Pemerintah Kota Pontianak atau Dinas Terkait yang Tugas Pokok dan Fungsinya mengarah ke Kementerian Perhubungan melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelanggaran kelebihan muatan menjadi tugas, kewenangan dan tanggung jawab Kementerian Perhubungan melalui UPPKB yang tertera dalam Perda Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kalimantan Barat di dalam Pasal 5 dan Pasal 12 yang berbunyi, "Setiap mobil barang yang mengangkut barang wajib ditimbang pada alat penimbangan yang dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan." dan Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi "Penyelenggaraan alat penimbangan yang dipasang secara tetap merupakan tanggung jawab Dinas yang pengoperasiannya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB)".[4]

Namun setelah penulis melakukan observasi awal dan mendapatkan informasi dari Berita online Tribun Pontianak, dalam kegiatan Operasi Simpatik di Jembatan Timbang UPPKB Siantan yang digelar oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalimantan Barat berkolaborasi dengan stakeholder terkait, seperti Kepolisian, Dinas Perhubungan Provinsi hingga

[3] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
[4] Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang di Kalimantan Barat.

Kabupaten Kota di Kalimantan Barat, yang juga didukung oleh pihak TNI pada tanggal 19-25 Agustus 2024 salah satunya di digelar di Jembatan Timbang, Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Siantan, Jalan Khatulistiwa, Pontianak Utara, Selasa 20 Agustus 2024, dari pelaksanaan Operasi Simpatik tersebut, terjaring sebanyak 31 kendaraan angkutan yang dikenakan tilang oleh UPPKB.

Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Siantan Ade Riyanto menjelaskan, kendaraan angkutan yang terjaring operasi, dikarenakan KIR yang bermasalah, seperti misalnya masa berlaku Kartu Uji Kendaraan (KIR) yang sudah kedaluwarsa. Selain itu banyak pula kendaraan angkutan yang *Over Dimension Over Loading (ODOL)*, karena merasa sudah menjadi rutinitas sehari-hari mengangkut barang yang berlebih.

“Terutama kendaraan angkutan barang (jadi sasaran operasi), karena memang untuk kendaraan angkutan barang ini apabila terjadi kecelakaan tingkat fatalitasnya cukup tinggi, karena secara angkutan mereka membawa muatan," ujarnya. “Untuk sanksi yang diberikan berupa penilangan, jadi apabila kendaraan yang melanggar, baik secara administrasi, dan dokumen, maupun secara muatan melebihi ketentuan yang sudah ditetapkan, kami akan lakukan penilangan," pungkasnya.[5]

[5] Tribun pontianak. 2024. Sebanyak 31 Angkutan Barang Ditilang Pada Operasi Simpatik di Jembatan Timbang UPPKB Siantan. Available from: https://pontianak.tribunnews.com/amp/2024/08/20/sebanyak-31-angkutan-barang-ditilang-pada-operasi-simpatik-di-jembatan-timbang-uppkb-siantan (Diakses November 15,2024)

Dari kondisi tersebut diatas, menggambarkan bahwa adanya ketidakseimbangan antara peraturan yang ada dengan kenyataan, para supir angkutan barang yang bermuatan atau perusahaan yang beroperasi di jalan raya masih saja melakukan pelanggaran daya angkut muatan hingga mengesampingkan keamanan umum. Muatan yang berlebih berdampak buruk terhadap semua pihak. Pertama, anggaran pemerintah yang tersedot banyak untuk perbaikan jalan-jalan rusak. kedua, kelebihan muatan juga akan merugikan para pengusaha karena makin berat muatan maka makin berat pula beban yang diterima kendaraan membuat kendaraan lebih cepat rusak karena komponen kendaraan tidak didesain untuk mengangkut beban seberat itu. Ketiga, pengguna jalan juga terkena imbas jika jalan menjadi rusak dan berpotensi besar mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.[6]

Pelanggaran kendaraan yang bermuatan berlebih masih tetap terjadi tetapi angka-angka tersebut belum diketahui secara maksimal karena kendaraan angkutan barang dalam jumlah yang cukup besar masih terlihat melintas di jalan, karena itu peneliti tertarik ingin mengkaji lebih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPPKB di Kecamatan Pontianak Utara.

---

[6] Amrillazi. 2024. "Implementsi Kewenangan Terhadap Pelanggaran Kelebihan Muatan Barang Berdasarkan Pengaturan Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih", *Jurnal Lancang Kuning Law,* 1(2): 5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disajikan, penelitian ini akan membahas permasalahan berikut:

1. Mengapa Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penimbangan Angkutan Barang Melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kecamatan Pontianak Utara Belum Berjalan Sesuai Mandat Undang-Undang ?
2. Bagaimana Upaya Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penimbangan Angkutan Barang Melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kecamatan Pontianak Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk Menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi penimbangan angkutan barang melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kecamatan Pontianak Utara belum berjalan sesuai dengan mandat undang-undang yang berlaku.
2. Untuk Merumuskan strategi dan rekomendasi konkret untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi penimbangan angkutan barang melalui UPPKB di Kecamatan Pontianak Utara agar dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan mandat undang-undang.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan penulisan dan pembahasan hukum ini adalah untuk memberikan kegunaan dan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum transportasi. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur yang ada mengenai regulasi dan pengawasan kendaraan angkutan barang, dengan fokus khusus pada pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di Kecamatan Pontianak Utara. Selain manfaat teoritis, penelitian kendaraan muatan juga dapat memberikan manfaat praktis, seperti:

   a. Sebagai acuan pengawasan jalan dan pencegahan kerusakan infrastruktur jalan.

   b. Referensi penelitian bagi pihak-pihak yang berkenaan dengan materi studinya.

   Melalui analisis mendalam terhadap aspek hukum dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan UPPKB, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kerangka hukum yang mengatur pengawasan angkutan barang, termasuk kekuatan dan kelemahannya dalam konteks hukum transportasi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat praktis yang signifikan bagi berbagai pihak terkait. Bagi pemerintah daerah dan Kementerian Perhubungan Kota Pontianak, hasil analisis ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor di Kecamatan Pontianak Utara.

Bagi pelaku usaha angkutan barang, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aspek hukum dan regulasi yang mengatur kegiatan mereka, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan mengurangi risiko pelanggaran. Masyarakat umum juga mendapat manfaat dari penelitian ini melalui peningkatan keselamatan lalu lintas dan perlindungan infrastruktur jalan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada optimalisasi fungsi angkutan barang dan penegakan hukum yang lebih efektif di wilayah tersebut.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini memiliki keaslian yang dapat dipertanggungjawabkan dalam konteks "**Analisis Yuridis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Terhadap Angkutan Barang di Kecamatan Pontianak Utara"**. Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji aspek hukum dari implementasi penimbangan kendaraan bermotor di wilayah ini. Meskipun

terdapat beberapa studi terdahulu yang membahas tentang penimbangan kendaraan bermotor atau angkutan barang di daerah lain, seperti:

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil	Perbedaan
1.	Rizka Khairani Lubis (Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan, Tahun 2023)	Pengawasan Kendaraan Bermuatan Barang di Satuan Pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal.	Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan serta data-data yang di dapat secara observasi maupun Wawancara yang dilakukan oleh penulis dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengawasan kendaraan Bermuatan barang di Satuan pelayanan UPPKB (Unit Pelaksana Penimbangan Kendaran Bermotor) Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal	– Pada penelitian sebelumnya, penelitian dilakukan pada UPPKB Jembatan Merah Kabupaten Mandailing Natal. Sedangkan pada Penelitian penulis, penulis melakukan penelitian pada UPPKB Kecamatan Pontianak Utara. Hal tersebut mengindikasikan akan terjadinya perbedaan hasil penelitian, karena masing-masing daerah memiliki permasalahan yang berbeda-beda dalam pelaksanaannya. – Penelitian sebelumnya

			melakukan pengawasan dengan melalui proses 3 (tiga) indikator yaitu rencana, perintah tujuan dan kebijaksanaan yang ditentukan.	menggunakan metode pendekatan Administrasi Publik sedangkan pada penelitian penulis menggunakan pendekatan analisis hukum.
2.	Febi Rahnia Yuri (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Tahun 2021)	Pengawasan angkutan barang oleh unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi	– Pengawasan UPPKB Muara Lembu dapat dikategorikan telah melakukan tugasnya dengan baik. Banyak pengemudi yang ditilang karena melanggar aturan dan banyak pula pengemudi yang memilih berhenti hingga jam operasional UPPKB Muara Lembu berakhir.	– Pada penelitian sebelumnya, penelitian dilakukan pada UPPKB Muara Lembu Kabupaten Kuantan Singingi. Sedangkan pada Penelitian penulis, penulis melakukan penelitian pada UPPKB Kecamatan Pontianak Utara. Hal tersebut mengindikasikan akan terjadinya perbedaan hasil penelitian, karena masing-masing daerah memiliki permasalahan yang

			– Dalam melaksanakan tugasnya, UPPKB Muara Lembu tidak lepas dari berbagai hambatan-hambatan yang ditemukan di lapangan, yakni minimnya jumlah petugas, sarana atau fasilitas pendukung yang masih kurang, sinergitas dengan pihak terkait.	berbeda-beda dalam pelaksanaannya. – Penelitian sebelumnya dilakukan terhadap pengawasan kendaraan overloading, sedangkan pada penelitian penulis melakukan analisis Pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan angkutan barang. – Penelitian penulis ini untuk menganalisis mengapa pelaksanaan tugas dan fungsi UPPKB Siantan belum berjalan sesuai dengan regulasi